
Anggota parlemen Asia Tenggara mengungkapkan keprihatinan besar atas kekuasaan darurat Malaysia yang terlalu luas

Kami, para anggota parlemen yang bertanda tangan di bawah ini, menyampaikan keprihatinan serius bahwa kekuasaan luas otoritas Malaysia di bawah keadaan darurat saat ini berisiko tidak hanya merusak fondasi demokrasi Malaysia tetapi juga membiarkan pintu terbuka lebar bagi potensi pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu kami menyerukan agar parlemen diizinkan untuk terus bekerja tanpa batasan.

Awal tahun ini, Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat, yang berlaku mulai 11 Januari hingga 1 Agustus, menyebut virus corona sebagai ancaman bagi keamanan, ekonomi, dan ketertiban umum negara. Ini diikuti dengan pengenalan Undang-undang Darurat (*Essential Powers*) 2021, yang memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada pihak berwenang, tanpa pengawasan yang berarti dari parlemen atau yudikatif.

Secara khusus, peraturan ini menghapus pengawasan legislatif dan membatasi kewenangan yudisial atas pejabat pemerintah selama keadaan darurat. Bagian 10 melindungi pemerintah dan perwakilan mereka yang ditunjuk untuk mengeluarkan arahan di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988 dari proses hukum sehubungan dengan "*setiap tindakan, pengabaian atau default yang dilakukan atau dihilangkan ... dengan itikad baik,*" sementara Bagian 14 dan 15 menanggukkan posisi parlemen dan majelis negara bagian sampai waktu yang ditentukan oleh Raja. Bagian 12 (6) Undang-undang juga menyatakan bahwa pemilihan umum akan diadakan hanya jika Raja "*menganggapnya tepat*".

Lebih lanjut, Bagian 7 dari Undang-Undang itu memberikan angkatan bersenjata kekuatan tambahan, yang menurut Menteri Pertahanan Malaysia akan mencakup kewenangan untuk menahan mereka yang melanggar perintah pengendalian pergerakan dan menangkap para migran yang ditemukan memasuki negara tersebut secara ilegal.

Kami ingin mengingatkan pihak berwenang bahwa, untuk memastikan agar langkah-langkah darurat tidak digunakan untuk menindas hak asasi manusia, atau secara permanen merebut institusi demokrasi, haruslah bersifat diperlukan dan dijalankan dengan proporsional dalam menangani ancaman yang dimaksud, dalam hal ini untuk mengekang penyebaran COVID-19. Kekuasaan tersebut harus bersifat sementara, tunduk pada pengawasan legislatif dan yudisial yang efektif, dan tidak digunakan secara diskriminatif untuk menargetkan kelompok tertentu.



Kuasa darurat Malaysia jelas tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan ini dan menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas pemerintah sangat terbatas, dan penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi.

Sebagai badan yang menjadi saluran ekspresi rakyat, parlemen memegang posisi sentral dalam demokrasi yang berfungsi, dan penangguhannya saat ini secara efektif menghilangkan partisipasi publik dari proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat mengkhawatirkan pada saat keputusan pemerintah akan memiliki konsekuensi jangka panjang pada kehidupan masyarakat.

Mempertimbangkan bagaimana tindakan darurat di kawasan ini, termasuk di Thailand dan Filipina, telah menyebabkan pembatasan kebebasan fundamental, sangatlah penting bagi parlemen untuk berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, sebagai anggota parlemen yang dipilih secara demokratis dari Asia Tenggara, kami mendesak Raja Malaysia, Ketua DPR, dan Perdana Menteri untuk sesegera mungkin meminta Parlemen bersidang guna memastikan akuntabilitas pemerintah, meninjau ulang tindakan darurat, melindungi hak asasi manusia, dan berkontribusi pada pengambilan keputusan-keputusan penting. Kami juga mengimbau Ketua DPR untuk memastikan bahwa komite parlemen diaktifkan dan tetap mengadakan rapat secara teratur. Parlemen di seluruh dunia telah mengadopsi cara-cara inovatif dan metode kerja daring (*online*) baru untuk memastikan mereka melanjutkan pekerjaan penting mereka selama pandemi yang juga dapat diadopsi oleh Malaysia.